

## BAB II TINJUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian terdahulu

Penulis penelitian ini menggunakan temuan dari penelitian lain dan bahan evaluasi dalam penyelidikan ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan signifikansi dan variasi antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang direncanakan penulis. Berikut penelitian yang digunakan:

- a. **Penelitian dengan tajuk “*Inovasi Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Petani oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan oleh (Abdurohim & Meirinawati, 2021)*”**

Penelitian berfokus pada upaya deskriptif terhadap inovasi Kartu Tani Mandiri (KPM) Plus yang digunakan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Peneliti mengambil pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif yang didukung dengan sejumlah data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan, disaring, dituangkan dalam bentuk kalimat dan ditarik intisarinnya, yang kesemuanya menjadi sejumlah langkah dalam metodologi analisis data. Menurut Utomo, ada lima fase manajemen inovasi, dan penelitian ini menggunakan penekanan penelitian manajemen inovasi. Langkah pertama adalah “eksplorasi ide dan kebutuhan inovasi” yang diperlukan mengingat masyarakat petani di Kabupaten Bojonegoro sangat membutuhkan kartu ini.

2) Inkubasi Inovasi: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan rencana untuk melaksanakan program petani mandiri, dengan menggunakan pembiayaan dari APBD. 3) Diseminasi atau Difusi Inovasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggunakan media cetak dan internet dalam menyebarkan informasi. Adopsi, Replikasi, dan Modifikasi Inovasi: Upaya yang dilakukan pemerintah setempat ini telah terbukti bermanfaat dan lembaga pemerintah lainnya yang berkenan untuk melakukan hal serupa. 5) Aktualisasi Orisinalitas menjadi tanggung jawab terlaksananya program ini;

untuk memastikan inovasi berjalan lancar dan sesuai jadwal, tugas pemantauan dan penilaian harus diselesaikan.

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu: salah satu masalah yang ada di sektor pertanian bojonegoro ialah kelangkaan pupuk dan mahalannya harga pupuk yang dinilai tidak sepadan dengan hasil panen yang ada. Sehingga munculah Program Petani Mandiri dan didalamnya terdapat sejumlah regulasi dan syarat yang perlu petani penuhi dan taati. Masalah yang lainnya ada serangan hama dan harga gabah yang tidak menentu atau bisa saja anjlok. Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan upaya sosialisasi atau sosialisasi tambahan terhadap program KPM Plus. Apabila muncul permasalahan baru, Pemkab Bojonegoro mungkin akan mengunjungi masyarakat di sekitar wilayah Bojonegoro untuk mendengar harapan para petani. Kedua, badan usaha milik negara dan swasta harus bekerja sama untuk mendanai Kartu Petani Mandiri, karena masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari program ini jika semakin banyak dana yang dialokasikan untuk itu. Untuk meredakan kekhawatiran masyarakat terhadap distribusi pupuk, langkah ketiga adalah mengawasi dan menjamin distributor pupuk menjaga ketersediaan pupuk (Abdurohim & Meirinawati, 2021).

**b. Penelitian dengan tajuk “*Analisis Kesejahteraan Petani Tembakau Dampak Politik Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi*” yang dilakukan oleh (Ibrahim & Maifianti, 2022).**

Jurnal ini meneliti dampak kebijakan pemerintah dalam menjaga taraf hidup petani tembakau ditengah badai Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif untuk menganalisis kesejahteraan petani tembakau dan efek kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi ini memiliki berbagai dampak pada petani, termasuk stabilitas harga, distribusi, dan ketidakpastian pembelian produk pertanian. Namun, kebijakan pemerintah terkait pertanian selama pandemi tidak menguntungkan petani tembakau, dan diperlukan kebijakan yang didasarkan pada analisis situasi dan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif untuk menganalisis kesejahteraan petani tembakau dan efek kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi ini memiliki berbagai dampak pada petani, termasuk stabilitas harga, distribusi, dan ketidakpastian pembelian produk pertanian. Namun, kebijakan pemerintah terkait pertanian selama pandemi tidak menguntungkan petani tembakau, dan diperlukan kebijakan yang didasarkan pada analisis situasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kesadaran akan hidup sehat tanpa rokok juga meningkat di tengah pandemi, dengan risiko Covid-19 yang lebih tinggi bagi perokok. Kebijakan pemerintah terkait industri tembakau, seperti larangan iklan rokok dan kenaikan tarif cukai, telah berdampak pada pendapatan petani tembakau. Petani tembakau juga menghadapi dilema antara kebijakan pandemi dan keberlanjutan ekonomi mereka. Solusi kebijakan yang dapat ditempuh adalah menetapkan patokan harga tembakau, standarisasi kualitas tembakau, pengadaan modal untuk petani, dan peningkatan kemitraan (Ibrahim & Maifianti, 2022).

c. **Penelitian dengan tajuk “*Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi*” yang dilakukan oleh (Kholis & Setiaji, 2020).**

Telaah yang dilakukan untuk meninjau adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Batang dalam memberikan bantuan pupuk terhadap petani. Penelitian ini menggunakan enam indikator untuk mengukur efektivitas subsidi pupuk, yaitu harga, jumlah, waktu, lokasi, jenis, dan mutu. Berdasarkan empat indikator, yaitu harga, jumlah, lokasi, dan mutu, kebijakan yang dikeluarkan tidak mampu menyentuh ranah efektivitas. Harga pupuk subsidi ternyata lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan pemerintah, dengan perbedaan harga mencapai 11,11% hingga 13,04%. Selain itu, penggunaan pupuk juga tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan, dan tempat pembelian pupuk masih belum sesuai dengan kios pengecer resmi yang ditentukan. Meskipun demikian, indikator waktu distribusi pupuk terbukti efektif karena tidak ada kekurangan pupuk subsidi. Indikator jenis pupuk yang benar juga terpenuhi. Penelitian ini

menyarankan agar pemerintah meningkatkan mekanisme distribusi dan pengawasan subsidi pupuk untuk memastikan efektivitas kebijakan ini.

Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah peninjauan atas efektivitas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang berupa pemberian bantuan pupuk terhadap petani. Peninjauan dilakukan dengan memperhatikan enam aspek untuk mengukur efektivitas bantuan pupuk, yaitu harga, jumlah, waktu, lokasi, jenis, dan mutu (Kholis & Setiaji, 2020).

Penelitian, sebagai metode ilmiah sebagai upaya pendalaman fokus studi, terdapat sejumlah ciri khas yang membedakannya dari jenis kegiatan intelektual lainnya. Salah satu perbedaan paling mencolok adalah fokusnya pada penggunaan metode penelitian yang ketat. Penelitian melibatkan proses pengumpulan data empiris yang dikumpulkan dengan cermat melalui eksperimen, survei, observasi, atau analisis data yang sistematis. Selain itu, penelitian juga ditandai oleh penggunaan tinjauan pustaka yang komprehensif untuk memeriksa dan memahami kerangka konseptual yang mendukung topik penelitian. Artinya, penelitian bukan hanya tentang mendiskusikan ide atau opini, melainkan lebih kepada penyelidikan objektif yang menghasilkan pengetahuan baru yang dapat diuji dan diverifikasi oleh pihak lain dalam komunitas ilmiah.

Penelitian ini juga memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena fokusnya tertuju pada aspek yang belum banyak dieksplorasi, yaitu Program Petani Mandiri (PMM), dimana penelitian ini lebih tertuju pada peningkatan produktivitas padi yang dianalisis melalui sudut pandang implementasi kebijakan. Dengan menyoroti perspektif implementasi kebijakan, penelitian ini berupaya memberikan wawasan baru mengenai bagaimana rencana peningkatan produktivitas padi di Kabupaten Bojonegoro direalisasikan di lapangan, mengidentifikasi hambatan-hambatan praktis yang mungkin muncul, dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan dampak program. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan sumbangan penting bagi pemahaman kita tentang pelaksanaan program ini

serta dapat membuka jalan bagi penyempurnaan program serupa di masa depan.

d. **Penelitian dengan tajuk “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Buah Pepaya di Desa Laikit Kabupaten Minahasa Utara” yang dilakukan oleh (Hendry Remi Wantania, Fanley Pangemanan, 2022).**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah yang diterapkan di Desa Laikit Kabupaten Minahasa Utara untuk memberdayakan masyarakat petani buah pepaya. Selain tempat tinggal, pangan merupakan kebutuhan pokok. Makanan akan selalu diperlukan bagi manusia selama masih ada kehidupan. Dapat dikatakan bahwa saat ini masih terdapat kekurangan dalam ketahanan pangan. Hal ini disebabkan masih adanya ketimpangan komposisi pangan penduduk, yaitu konsumsi beras yang berlebihan dan produk hewani, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang relatif sedikit. Oleh karena itu, pemerintah mengelola pangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Metodologi penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan temuan penelitian, satu-satunya program yang tertuang dalam Renstra Kabupaten setempat di Tahun 2016 sama dengan empat tahun selanjutnya dengan korelasi pemberdayaan adalah program yang hanya berasal dari pemerintah federal dan tidak dilaksanakan dengan baik di dunia nyata. Dalam bidang pemberdayaan petani buah pepaya, peneliti tidak menerima barang atau kebijakan hukum tertulis dari pemerintah Pemerintah Desa Laikit dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Hendry Remi Wantania, Fanley Pangemanan, 2022). Baik Desa Laikit maupun Kabupaten Minahasa Utara tidak mempunyai strategi pemberdayaan konseptual. Hal ini menunjukkan bahwa petani buah pepaya di Desa Laikit tidak diberdayakan oleh inisiatif khusus yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Namun peneliti tidak mendapatkan rencana strategi Pemda Kabupaten Minahasa Utara dalam penguatan petani buah pepaya dari sudut pandang penerapan kebijakan lingkungan hidup. Meskipun demikian, pemerintah Desa Laikit berupaya untuk membentuk organisasi

petani untuk meningkatkan perekonomian lokal dan memberikan peluang kecil bagi petani buah pepaya untuk menjaga produktivitas industri mereka di Desa Laikit.

**e. Penelitian dengan tajuk “Peran Keanekaragaman Hayati untuk Mendukung Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia” yang dilakukan oleh (Wulanjari & Setiani, 2018)**

Tinjauan dilakukan sebagai upaya melihat seberapa besar manfaat yang diterima Gapoktan Berkah atas inisiatif Desa Benih Mandiri yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2015. Dengan adanya bantuan program Desa Benih Mandiri (DMB), para petani dapat menggunakan benih berkualitas untuk memperoleh hasil terbaik dan sekaligus mengentaskan politik sebelumnya mengenai kualitas tanaman. Peningkatan produksi beras nasional dan swasembada beras diharapkan dapat dicapai melalui ketersediaan benih yang lebih baik. Para petani juga berharap dengan terbentuknya Desa Benih Mandiri maka akan dapat dihasilkan benih berkualitas yang tumbuh sesuai perkiraan. Pada dasarnya petani sering mengeluh karena seringnya kendala berupa keterlambatan dari pemerintah berkaitan dengan bantuan benih. Melalui Program 1000 Desa Benih Mandiri, pemerintah berupaya mempererat tali silaturahmi antara petani dan produsen benih.

Petani dan Gapoktan dididik untuk memproduksi benih di fasilitas DBM ini. Selain itu, ia memiliki infrastruktur dan peralatan yang diperlukan untuk memungkinkan Anda memproduksi benih sendiri. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendorong inisiatif 1.000 Desa Mandiri Benih dan memberikan wewenang lebih besar kepada para pemulia benih untuk meningkatkan produksi benih di wilayah tersebut. Di Jawa Tengah, terdapat 55 komunitas yang berpartisipasi dalam inisiatif ini hingga tahun 2015. Gapoktan Berkah yang terletak di Desa Bendungan, Simo, Boyolali, yang turut menjadi partisipasi DBM di Jawa Tengah. Observasi langsung dengan turun ke lapangan dan percakapan dengan pimpinan Gapoktan Berkah digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang diperoleh dilakukan analisis deskriptif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% petani memanfaatkan benih Gapoktan Berkah. Karena kendala keuangan, produksi benih belum berjalan, dan hal inilah yang menjadi permasalahannya. Mereka kini hanya berproduksi satu musim dalam setahun karena keterbatasan modal sembari berharap atas keuntungan dari panen sebelumnya yang menghasilkan benih yang nantinya akan dijual. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa benih tidak selalu tersedia (Wulanjari & Setiani, 2018). PB Gapoktan Berkah berniat untuk terus bisa menghasilkan benih siap jual seiring dengan semakin banyaknya petani lokal yang memanfaatkan produknya. Selain itu, kondisi sawah dan pasar Desa Bendungan yang ada saat ini menunjukkan peluang yang besar untuk dalam berniaga benih khususnya sebagai produsen. Gapoktan Berkah melalui Program DBM memperoleh sertifikasi sebagai penghasil benih dengan kualitas yang baik yang kemudian petani lokal memanfaatkan benih tersebut, dan sisanya dijual ke pedagang dan perusahaan benih.

**f. Penelitian dengan tajuk “*Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Transformasi Nilai-Nilai Kewirausahaan dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Cinta Petani (Sari Tani) di Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara*” yang dilakukan oleh (Bekun & Tiza, 2017).**

Distrik Insana Kabupaten Timor Tengah Utara, dilakukan penelitian dengan berupaya mengkarakterisasi dan mengkaji bagaimana Program Sari Tani telah membawakan sikap kewirausahaan masyarakat desa Serta memberdayakan masyarakat pedesaan. Ada pendekatan kualitatif dalam prosesnya. Temuan studi memaparkan bahwasanya polemik yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah kemiskinan, sebagaimana RPJMD yang dibentuk pada 2011 dan berlaku sampai dengan empat tahun setelahnya. Berdasarkan statistik BPS, Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai penduduk miskin hampir separuh dari keseluruhan penduduk atau tepatnya berada diangka 44,47%.

Guna memanfaatkan potensi setempat dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat, pemerintah menawarkan Program Sari Tani

yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan melalui pendekatan pembangunan. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan. Tujuan utama program Sari Tani TTU Regency adalah untuk meningkatkan taraf hidup daerah pedesaan dengan menciptakan lapangan kerja yang terkonsentrasi pada pertumbuhan usaha yang menguntungkan. Tujuan khusus dari program Sari Tani berupa penurunan persentase penduduk yang terkategori miskin di pedesaan serta memberikan lebih banyak pilihan usaha bagi mereka, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah (Bekun & Tiza, 2017).

Namun demikian, konsepsi masyarakat dalam program yang dijalani masih kurang tepat, sehingga kurang proaktif dalam pengelolaan uang sehingga pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik; Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) kurang memahami tanggung jawab utama mereka; Unit Pelaksana Sari Tani (UPST) masih kurang memahami tanggung jawab utamanya; minimnya bantuan dari pemerintah desa; Karena masih adanya keterkaitan antara sikap dan perilaku masyarakat serta budaya (adat istiadat), program Sari Tani kurang dipandang baik. Keadaan ini menyulitkan masyarakat untuk mengembangkan jiwa kewirausahaannya dan menjadi mandiri, khususnya di bidang perekonomian.

**g. Penelitian dengan tajuk “*Impact Evaluation Kartu Petani Mandiri (KPM) terhadap Eksistensi Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro di Era Pandemi Covid-19*” yang dilakukan oleh (Putri et al., 2021).**

Salah satu perhatian utama dalam pertumbuhan pertanian adalah produktivitas, yang terkait erat dengan kemiskinan, khususnya dalam konteks epidemi Covid-19. Oleh karena itu, masih diperlukan kajian mengenai seberapa baik sektor pertanian dapat mengurangi kemiskinan. Atas dasar tersebut, pendalaman terhadap polemik yang diangkat dimaksudkan untuk meninjau cara-cara penanggulangan kemiskinan sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro (yaitu pemberian stimulus Kartu Tani Mandiri kepada kelompok tani) baik sebelum maupun sesudah terjadinya wabah Covid 19 yang merupakan bencana nasional (misal: dampak -ante

dan ex-post). Evaluasi Dampak melalui Analisis Efek Perlakuan dengan tiga model penelitian, memanfaatkan data survei pertanian (Nilai Tukar Petani/NTP) Kabupaten Bojonegoro tahun 2019–2020, merupakan pendekatan untuk menilai efektivitas program. Faktor penentu penelitian meliputi tenaga kerja dan kuantitas produksi, nilai produksi, produktivitas pertanian dengan variabel kontrol luas lahan pertanian, sumber air, dan biaya produksi pertanian dengan variabel kontrol dummy KPM, dummy sumber air utama, dummy jenis tanaman, dan indeks diterima. petani (IT), umur, dan indeks gaji petani (IB). Adapun hasil yang diketahui berupa kelompok penerima dari para petani memperoleh hasil yang lebih baik (Putri et al., 2021) Karena hutan menutupi setidaknya 40% wilayah Kabupaten Bojonegoro, KPM turut merangkul petani lainnya dengan kuantitas yang cukup besar seperti petani hutan, sehingga memastikan distribusi program yang lebih adil untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

**h. Penelitian dengan tajuk “*Pengembangan Model Pemberdayaan Petani Padi melalui Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian*” yang dilakukan oleh (Khusna et al., 2019)**

Meskipun Kabupaten Jember merupakan daerah penghasil beras dengan kuantitas teratas pada 2016 khususnya pada regional Jawa Timur, namun pada nyatanya petani setempat masih banyak yang memiliki taraf hidup rendah. Program Agromaritim Hulu dan Hilir Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur memasukkan Kabupaten Jember kedalam salah satu proyek uji coba pada tahun 2017. Adanya pendalaman terhadap polemik yang diangkat dimaksudkan untuk mendeskripsikan langkah pemberdayaan yang dilakukan Pemda terhadap petani. Pendekatan kualitatif digunakan dalam metodologi penelitian. Purposive sampling merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi informan. Temuan penelitian memberikan wawasan bahwasanya model pemberdayaan yang dilakukan adalah kemitraan.

Pemprov Jatim, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Bank Jatim, Asuransi Jasindo, GAPOKTAN Mitra Tani Sejati, dan Petani termasuk di antara pemangku kepentingan program ini. Untuk menyukseskan Program Agromaritim Hulu dan Hilir Sektor Pertanian, masing-masing pemangku kepentingan mempunyai peran tersendiri. Temuan investigasi menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian sektor pertanian terhadap Program Hulu dan Hilir Agromaritim 2018, masih terdapat kendala pada prosedur hilir program (Khusna et al., 2019). Pemerintah harus fokus pada aspek koordinasi dan komunikasi inisiatif pemberdayaan dalam perannya sebagai pelindung. Jika semua pemangku kepentingan mengetahui tujuan program, maka program dapat berfungsi secara efisien. Hal serupa juga terjadi pada proyek agromaritim hulu dan hilir yang dilaksanakan untuk memberdayakan petani.

**i. Penelitian dengan tajuk “Pemberdayaan Petani Kopi Oleh Dinas Pertanian Di Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh” yang dilakukan oleh (Kasmita et al., 2021).**

Kelompok tani mendukung program yang dicanangkan berupa pemberdayaan dengan menawarkan peluang kepemimpinan dan partisipasi. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan daya cipta petani sehingga menghasilkan petani yang handal, mandiri, dan inovatif yang juga dapat berkarya bagi petani lainnya. Adapun maksud dari penelitian berupa peninjauan terhadap langkah pemberdayaan dilakukan oleh Dinas Pertanian setempat, beserta sejumlah tantangannya dan langkah penanganannya. Implementasi dari konsep deskriptif kualitatif digunakan untuk menunjang penelitian dengan mengedepankan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data juga melibatkan tahapan tambahan antara lain reduksi data, penyajian data, penyusunan kesimpulan, dan verifikasi.

Temuan penelitian membawakan fakta bahwasanya meskipun program pemberdayaan terhadap petani kopi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian setempat telah berhasil dilaksanakan, namun masih terdapat

sejumlah tantangan yang dihadapi baik oleh pemerintah maupun petani kopi setempat. Departemen Pertanian mengadakan sesi pelatihan bagi petani kopi setiap tahun tentang cara merevitalisasi tanaman yang mati dan memangkas tanaman yang tidak produktif, namun kualitas pengajarannya masih di bawah standar karena sesi tersebut tidak diulangi seperti tahun-tahun sebelumnya (Kasmita et al., 2021). Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah telah berupaya memberdayakan produsen kopi dengan membangun infrastruktur dan fasilitas, mengelola anggaran, mempekerjakan lebih banyak staf, menjual produk pertanian secara lebih agresif, dan memberikan penyuluhan kepada petani.

**j. Penelitian dengan tajuk “Persepsi Petani Dan Permasalahan Program Kartu Tani Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi” yang dilakukan oleh (Gunawan & Pasaribu, 2020).**

Mayoritas wilayah pada pulau Jawa, program kartu tani telah diperkenalkan pada tahun 2016, namun belum ada kemajuan dalam implementasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana petani memandang program kartu tani yang mendukung distribusi pupuk dengan biaya lebih murah. Temuan analisis Indeks Rata-Rata Tertimbang (WAI) menunjukkan bahwa pendapat petani terhadap kartu tani sangat dipengaruhi oleh keyakinan mereka bahwa program tersebut dilaksanakan dengan buruk dan bahwa penggunaan kartu tani menimbulkan tantangan. Masih banyak ditemukan penyalahgunaan pupuk bersubsidi pada tanaman perkebunan yang seharusnya dipupuk dengan pupuk non-subsidi. Hal ini menyebabkan kekurangan pupuk, yang pada akhirnya merugikan petani kecil yang bergantung pada pupuk yang disubsidi pemerintah.

Lemahnya pengawasan departemen dan kegagalan Kementerian Pertanian untuk mengadili distributor yang tidak jujur yang menjual pupuk bersubsidi di luar e-RDCK yang disetujui adalah penyebab situasi ini. Petani juga mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap kemudahan dan keandalan dalam menerima pupuk bersubsidi melalui penggunaan kartu petani ini (Gunawan & Pasaribu, 2020). Sebaliknya para petani kurang

berpikir panjang dalam menggunakan kartu petani ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kios distributor kurang mempromosikan penggunaan kartu petani dan petani tidak diwajibkan untuk menggunakannya. Kendala utama pelaksanaan program Kartu Tani adalah ketidaktahuan petani akan cara penggunaannya, seluk-beluknya, dan tidak adanya mandat dari Pemerintah Daerah (Pemda). Disarankan agar program kartu tani dijadikan inisiatif nasional, tersedianya jaringan infrastruktur komunikasi, semakin banyak pihak yang bekerja sama dan mempunyai tujuan yang sama, serta dilaksanakannya sosialisasi yang menyeluruh dan matang.

Penelitian ini berbeda secara signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Salah satu kajian terdahulu mengenai Program Petani Mandiri adalah artikel jurnal tahun 2021 yang ditulis oleh Nurudin Abdurohim. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal penelitian sebelumnya, yaitu jurnal penelitian ini menggunakan metode yang dipaparkan oleh Ripley dan Franklin, yaitu berdasarkan pengukuran efektivitas implementasi kebijakan, sedangkan jurnal penelitian ini menggunakan teori manajemen inovasi Utomo. Keistimewaan lainnya adalah penelitian ini fokus pada bagaimana pelaksanaan Program Petani Mandiri khususnya pada bidang Hibah Benih dan Pupuk di Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru, sedangkan penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada kesejahteraan petani di Kabupaten Bojonegoro.

Selain itu, terdapat penelitian sebelumnya mengenai pertanian yang berbeda dari penelitian ini namun memiliki persamaan tertentu. yang mencakup inisiatif yang dirancang pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian; Selain itu, tidak semua penelitian sebelumnya membahas hibah untuk benih padi dan pupuk dengan cara yang sama seperti penelitian ini.

## **2.2 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah satu dari sejumlah langkah untuk bisa membentuk sebuah payung hukum, di mana rencana ataupun kebijakan yang telah disusun di atas kertas mulai diterapkan dalam praktik atau diimplementasikan di lapangan. Ini adalah proses penting di mana kebijakan pemerintah, program, atau tindakan yang direncanakan dijalankan oleh berbagai agen dan lembaga pemerintah

serta pihak terkait lainnya sebagai upaya mewujudkan target dari adanya regulasi yang dibentuk. Strategi implementasi melibatkan dua jalur utama: program pemerintah dan kemitraan/ masyarakat (Hess & Gentry, 2019) dan penelitian implementasi melibatkan transparansi, pertimbangan dinamika kekuasaan, pembagian sumber daya yang adil, penghormatan terhadap nilai-nilai komunitas, dan penyertaan mitra yang berbeda ras/etnis sebagai pengambil keputusan yang adil sejak dini dan sering (Shelton et al., 2021)

Istilah Implementasi merupakan kata lain dari pelaksanaan, dengan ini bisa diartikan bahwasanya penyediaan terhadap sarana dengan maksud membawakan efek ataupun pengaruh dapat diartikan sebagai implementasi. Menurut penjabaran tersebut implementasi bisa merujuk pada banyak konteks, seperti implementasi teknologi, kebijakan, atau proyek. Sedangkan menurut Nurdin Usman dalam jurnal (Novan Mamoto, 2018) kalau dipikir-pikir, implementasi hanyalah sebuah aktivitas, sebuah tindakan, atau hadirnya sebuah mekanisme sistem; ini lebih dari sekedar aktivitas sederhana untuk mencakup aktivitas terencana yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut ini adalah langkah-langkah umum untuk menjalankan implementasi, yaitu: perencanaan, desain, pengembangan, uji coba, pelatihan, pemeliharaan, dokumentasi, penyelesaian dan penutup. Dalam konteks ini, implementasi dapat memiliki nuansa dan tantangan yang berbeda tergantung pada konteksnya, Keberhasilan implementasi sering kali tergantung pada perencanaan yang baik, komunikasi yang efektif, dan pemantauan yang teliti selama seluruh prosesnya. Selanjutnya Fokus penelitian pada strategi implementasi fokus pada pendekatan untuk meningkatkan penerapan praktik berbasis bukti (misalnya, melanjutkan pendidikan profesional, perubahan organisasi, atau insentif keuangan) (Wensing et al., 2021).

Tahap-tahap Implementasi Kebijakan yaitu Pelaksanaan kebijakan publik mengandalkan berbagai model yang digunakan sebagai pedoman dalam perancangan dan pelaksanaannya. Proses implementasi kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap elemen-elemen yang turut berpartisipasi, baik itu instansi pemerintah sampai dengan publik umum. Implementasi bukanlah suatu peristiwa tetapi suatu proses penyesuaian organisasi yang dipertimbangkan secara hati-hati dan berlangsung selama proses tersebut 2-4 tahun (Bertram et al., 2015)

Model Ripley dan Franklin (1986:12) dalam (Akib, 2010) yaitu Literatur tentang administrasi publik memperkenalkan teknik kepatuhan. Sejauh mana agen atau orang bawahan mematuhi agen atau individu atasan merupakan penekanan utama metode ini. Sudut pandang kepatuhan mengkaji sifat dan standar perilaku di dalam organisasi. Ripley mengklaim bahwa sudut pandang kepatuhan memiliki setidaknya dua kelemahan: (1) banyaknya elemen non-birokrasi yang mempengaruhi hasil namun kurang mendapat perhatian, dan (2) program yang tidak terstruktur dengan baik. Sudut pandang kedua bersifat faktual dan mempertimbangkan bahwa berbagai peristiwa berdampak pada proses penerapan kebijakan, sehingga memerlukan keleluasaan yang lebih besar bagi para pelaksana untuk melakukan perubahan.

Indikator kepatuhan birokrasi merujuk pada sejumlah metrik atau tanda yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah birokrasi atau lembaga pemerintahan mematuhi aturan, prosedur, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan. Kepatuhan birokrasi merupakan aspek penting dalam menjaga integritas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan birokrasi meliputi:

1. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Regulasi: Evaluasi sejauh mana sebuah birokrasi mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan standar etika.
2. Akuntabilitas Finansial: Pengukuran apakah sebuah birokrasi atau lembaga pemerintahan menjalankan anggaran dengan benar dan menghindari penyalahgunaan dana publik. Ini mencakup audit internal dan eksternal, pelaporan keuangan yang transparan, dan pemantauan penggunaan anggaran.
3. Prosedur Pengadaan dan Kontrak: Penilaian terhadap proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan kontrak dalam organisasi pemerintah. Ini termasuk aspek seperti persaingan yang sehat, transparansi, dan integritas dalam proses pengadaan.
4. Pelayanan Publik: Pengukuran kualitas dan kecepatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ini mencakup kriteria seperti waktu pelayanan, kejelasan prosedur, dan kepuasan pelanggan.

5. Kepatuhan Etika dan Kode Etik: Evaluasi apakah anggota birokrasi mematuhi kode etik dan standar perilaku yang telah ditetapkan. Ini termasuk tindakan pencegahan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.
6. Transparansi dan Akses Informasi: Ketersediaan informasi publik dan kemudahan akses masyarakat ke informasi pemerintah. Ini mencakup kepatuhan terhadap undang-undang kebebasan informasi dan upaya untuk meningkatkan transparansi.
7. Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko: Pengukuran efektivitas sistem pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan, kecurangan, dan ketidakpatuhan. Ini mencakup manajemen risiko dan tindakan pencegahan.
8. Evaluasi Kinerja dan Audit Internal: Proses penilaian kinerja internal yang dilakukan secara independen untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi dalam organisasi.
9. Kepatuhan Terhadap Kebijakan dan Rencana Strategis: Pengukuran sejauh mana keputusan dan tindakan organisasi sejalan dengan kebijakan dan rencana strategis yang telah ditetapkan.
10. program yang direncanakan harus sesuai dengan kondisi yang ada dimasyarakat.

Indikator-indikator ini dapat bervariasi tergantung pada jenis birokrasi atau lembaga pemerintahan yang dievaluasi dan tujuan evaluasinya. Penilaian kepatuhan birokrasi penting untuk memastikan bahwa pemerintahan beroperasi secara efektif, adil, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

### **2.3 Program Petani Mandiri (PPM)**

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bagi petani, maka diperlukan bantuan melalui Program Petani Mandiri”(Abdurohim & Meirinawati, 2021). Sejak tahun 2018 diberlakukannya program ini, diharapkan bagi petani banyak terbantu. Selanjutnya Program ini diibaratkan sebagai rumah dan ada anak program lagi didalamnya. Anak-anak program dan sesuai dengan ketentuannya sebagai berikut(Pakan, 2007) :

1. Penggunaan Hibah (Benih dan Pupuk)

Salah satu program petani mandiri (PPM) yaitu pemeberian hibah berupa pembelanjaan saprodi yang diperoleh sejalan dengan RAB sebagaimana yang tertera dalam pengajuan dalam bentuk proposal dengan nomilan kurang dari Rp. 2.500.000,00 untuk setiap hektar. Pemeberian hibah merupakan modal dalam bentuk yang pertama yaitu:

- Benih dan Pupuk

ada jenis varietas yaitu yang benih padi dan jagung, perjenis benih ditentukan berapa Kg disetiap satu hektarnya. Untuk benih padi pada satu hektar sawah disediakan kurang lebih 25 kg sedangkan untuk pupuk untuk benih padi perhektar mendapatkan bantuan kurang lebih 300 kg. untuk benih jagung disediakan perhektarnya adalah 15 kg dan mendapatkan bantuan pupuk sekitar 150 kg perhektarnya.

Sedangkan jenis tanaman bawang merah dan tembakau hanya mendapatkan bantuan pupuk dan perhektarnya mendapat bantuan 150 kg pada kedua jenis tanaman tersebut.

## 2. Jaminan Pembelian Hasil Panen

Dalam jaminan pembelian hasil panen ini Poktan/Gapoktan sangat disarankan untuk menjalin kerja sama dengan BUMDes atau BUMD setempat untuk menjual hasil dari pertaniannya yang dijual berdasarkan harga kesepakatan bersama agar perekonomian dapat berputar diwilayah desa tersebut.

Dana yang didapatkan oleh BUMDes atau BUMD sendiri didapatkan melalui bantuan dari Pemprov Jawa Timur sebesar 100 juta, pemberian dana itulah yang nantinya bisa digunakan untuk membeli hasil panen dari petani yang terdaftar di Kartu Petani Mandiri.

## 3. Prioritas Pelatihan Dan Pengembangan Usaha Tani

Petani pemegang Kartu Petani Mandiri Plus diprioritaskan untuk memperoleh berbagai pelatihan seperti pembuatan kerajinan tangan, pengolahan hasil pertanian, desain kemasan, pembuatan POC, dan lainnya, difasilitasi oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Bojonegoro.

Poktan mengajukan Proposal ke Bupati, proposal didisposisi dan verifikasi, setelah penganggaran akan dilaksanakan pelatihan.

## 4. Asuransi Gagal Panen atau Asuransi Peternakan

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang keseluruhannya premi yang ditawarkan dibebankan pada pemerintah yang bersumber dari APBD sejumlah 20% dan 80% APBN. Asuransi yang ditawarkan sejumlah Rp.6.000.000,00 disetiap hektarnya dalam sekali musim tanam, dengan penyebab hama, dan bencana alam lainnya. Untuk bisa memperolehnya, para petani hanya perlu mengajukan secara online melalui SIAP AUTP. Dan untuk peternak sapi karena Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) juga bisa diakses lewat dinas peternakan.

#### 5. Askes Beasiswa / Pendidikan

Pemerintah kabupaten Bojonegoro melalui perangkatnya yang menangani perosalan pendidikan dengan merumuskan kebijakan berupa beasiswa yang diperoleh dengan adanya KPM beserta sejumlah ketentuan yang berlaku dengan nama program “Satu Desa Dua Sarjana”.

PPM di Kabupaten Bojonegoro berupaya memperbaiki taraf hidup yang dimiliki petani, mengurangi disparitasnya, dan mendorong perluasan industri pertanian di daerah tersebut. Selain itu, inisiatif ini juga dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan pangan Kabupaten Bojonegoro. Agar Program Bantuan Mandiri (PPM) dapat memberikan bantuan, penerima harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. terdaftar pada organisasi petani terdekat;
2. Ada atau tidaknya KPM;
3. Kepala keluarga yang tidak secara terus-menerus memperoleh hibah dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
4. Tulis surat yang menyatakan kesiapan Anda untuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang terkait.

Kualifikasi untuk memperoleh Kartu Petani Mandiri (KPM):

1. Kepala keluarga petani yang memiliki tanah maupun penggarap dengan rutinitas hortikultura, pertanian padi, serta kegiatan lain yang terkait;
2. Kepala keluarga yang bertani dan/atau mengolah lahan paling banyak 2 hektar;
3. Kepala keluarga petani berdomisili di desa atau kelurahan dimana ia berdomisili;
4. Hanya terdapat 1 (satu) orang kepala keluarga petani per domisili atau alamat rumah;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
6. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau sertifikat Dinas Dukcapil;

7. Fotokopi surat keterangan hak atas tanah, laporan pajak, atau surat keterangan dari lurah atau camat Setempat;
8. Surat keterangan dari lurah atau camat yang menegaskan kebenaran atau kebenaran alamat tempat tinggal;
9. Keterangan mengenai status pemilik dan/atau penggarap serta areal yang dimiliki atau diusahakan.

